



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	6
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

# DPD RI Raih WTP 13 Kali Berturut-Turut

## Donny Moenek: Komit Kelola Anggaran Sesuai Aturan

Jakarta, Padek—Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerima predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penghargaan opini WTP tersebut diterima Ketua DPD RI Oesman Saptá dari

Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Kamis (12/9).

Sekretaris Jenderal DPD RI, Reydonnyzar Moenek yang akrab dipanggil Donny Moenek yang hadir dalam acara itu mengatakan, perolehan opini WTP menunjukkan pencapaian tertinggi

DPD RI atas pengelolaan APBN oleh sebuah instansi atau lembaga negara.

“Ini bagian komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Kemudian bagaimana menjamin transparansi dan akuntabilitas, termasuk masalah-masalah yang termasuk governance dalam pengelolaan keuangan,” ucap peraih Penghargaan Jubir Kementerian terbaik 2012 ini.

Mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri

ini juga mengatakan DPD RI opini WTP secara berkelanjutan ber-komitmen dalam pembentukan sistem pengelolaan keuangan negara yang diikuti adanya laporan pertanggungjawaban yang sesuai peraturan. Sehingga pengelolaan APBN di DPD RI dapat dipertanggungjawabkan dan ke depan dapat memperoleh imbuhan pakar fiskal dan pemer-



Reydonnyzar Moenek

intahan yang pernah menjadi Penjabat Gubernur Sumbar ini. Menurut Dosen IPDN ini, pencapaian prestasi Opini WTP ke-13 kali berturut-turut ini tidak lepas dari peranan pimpinan dan anggota DPD RI serta kerja sama yang baik dengan lembaga-lembaga pemeriksa keuangan negara. Komitmen dari pimpinan DPD RI untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel menjadi acuan bagi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam menyusun

mekanisme pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. “Dan tentunya adalah kerja sama, koordinasi, sinergitas, harmoni, dan keinginan dan kemauan kami semua untuk terus belajar meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan termasuk mendapatkan asistensi dari Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah atau (APIP). Tentunya tersedianya standar pemeriksaan yang berkenaan dengan itu,” kata Donny. (fas)